

**PERENCANAAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN 12 TAHUN
DI PROVINSI SUMATERA BARAT**

TESIS

Oleh :

TOTO SUGIARTO
07 206 062



**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
2009**

Perencanaan Wajib Belajar Pendidikan 12 Tahun di Provinsi Sumatera Barat

Oleh: Toto Sugiarto

(Di bawah bimbingan Sjafrizal dan Elfindri)

RINGKASAN

Tujuan pelaksanaan wajib belajar pendidikan 12 tahun adalah untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Sumatera Barat. Potensi untuk melaksanakan wajib belajar pendidikan 12 tahun ini sangat tinggi, hal ini sesuai dengan perencanaan pembangunan pendidikan dalam RPJP 2005-2025 dan RPJM 2006-2010 provinsi Sumatera Barat, dan didukung oleh kebijakan pemerintah provinsi Sumatera Barat melalui pengalokasian dana untuk sektor pendidikan mencapai 20% dari APBD.

Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi pendidikan pada jenjang pendidikan SMA/MA/SMK, merencanakan kebutuhan komponen pendidikan dan menghitung lama waktu pelaksanaan wajib belajar pendidikan 12 tahun, menyusun strategi dan kebijakan yang digunakan untuk melaksanakan wajib belajar pendidikan 12 tahun, serta menganalisis kebutuhan anggaran pendidikan pemerintah provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan wajib belajar pendidikan 12 tahun.

Data penelitian menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS), Sumatera Barat dalam Angka, Statistik Keuangan Daerah, dan data profil pendidikan dinas pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis perhitungan indikator pendidikan, analisis perencanaan, analisis SWOT (*Strength, Weaknesses, Opportunities, Threat*), dan Analisis Anggaran Pendidikan.

Hasil perhitungan indikator pemerataan dan perluasan pendidikan, capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang pendidikan SMA/MA/SMK masih rendah merupakan indikator masih belum

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu aspek terpenting dalam pembangunan bangsa, sejarah menunjukkan bahwa kunci keberhasilan pembangunan negara-negara maju adalah tersedianya sumber daya manusia yang terdidik dalam jumlah, jenis, dan tingkat yang memadai. Oleh karena itu, hampir semua bangsa menempatkan pembangunan pendidikan sebagai prioritas utama dalam program pembangunan nasional mereka. Sumber daya manusia yang bermutu, yang merupakan produk pendidikan, merupakan kunci keberhasilan pembangunan suatu negara. (Depdiknas, 2008a).

Sumber daya manusia merupakan merupakan salah satu modal dasar pembangunan nasional. Pembangunan suatu bangsa memerlukan *critical mass*, yaitu sumber daya manusia dalam jumlah dan mutu yang memadai sebagai pendukung pembangunan. Oleh karena itu bangsa Indonesia perlu mengupayakan adanya jumlah tertentu dari penduduk Indonesia agar memiliki tingkat dan jenis pendidikan serta keahlian tertentu untuk memenuhi *critical mass* tersebut. (Depdiknas, 2008b).

Menyadari hal tersebut di atas pada tahun 1984 telah dicanangkan program wajib belajar pendidikan dasar 6 tahun, yang kemudian pada tahun 1994 dilanjutkan dengan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia Indonesia. Program ini menargetkan semua warga negara Indonesia memiliki pendidikan minimal setara Sekolah Menengah Pertama dengan mutu yang baik. Pemerintah pusat melalui Departemen Pendidikan Nasional telah menargetkan

bahwa program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun telah tuntas pada tahun 2008, sehingga daerah-daerah yang telah berhasil menuntaskan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, diarahkan untuk merintis dan melaksanakan program wajib belajar 12 tahun. Dengan bekal ini diharapkan seluruh warga negara Indonesia dapat mengembangkan dirinya lebih lanjut yang akhirnya mampu memilih dan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan potensi yang dimiliki, sekaligus berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. (Depdiknas, 2008a).

Keunggulan suatu bangsa tidak lagi bertumpu pada kekayaan alam, melainkan pada keunggulan sumber daya manusia (SDM), yaitu tenaga terdidik yang mampu menjawab tantangan-tantangan yang sangat cepat, secara mutu SDM Indonesia saat ini masih ketinggalan dan berada di belakang SDM negara-negara maju dan negara tetangga, seperti Singapura dan Malaysia. Laporan United Nation Development Program (UNDP) dapat dijadikan acuan untuk melihat mutu manusia Indonesia dibandingkan negara-negara lain, yang terangkum dalam Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dari 177 negara, posisi Indonesia berada pada ranking 108.

Tantangan paling serius yang dihadapi bangsa ini dimasa depan adalah fenomena globalisasi yang tidak mungkin dihindari, sehingga harus dihadapi dengan segala konsekuensinya. Fenomena global adalah efek dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. Diberlakukannya AFTA 2003 (*Asean Free Trade Area*), APEC 2010 (*Asia Pacific Economic Cooperation*) dan WTO 2020 (*World Trade of Organization*), harus diantisipasi dan disiasati sejak dini agar kita menjadi bangsa yang kompetitif. Oleh karena itu, semua upaya bangsa, termasuk

BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1 Kesimpulan

Tujuan pelaksanaan wajib belajar pendidikan 12 tahun adalah untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Sumatera Barat. Potensi untuk melaksanakan wajib belajar pendidikan 12 tahun ini sangat tinggi, hal ini sesuai dengan perencanaan pembangunan pendidikan dalam RPJP 2005-2025 dan RPJM 2006-2010 provinsi Sumatera Barat, dan didukung oleh kebijakan pemerintah provinsi Sumatera Barat melalui pengalokasian dana untuk sektor pendidikan mencapai 20% dari APBD.

Keberhasilan pendidikan pada jenjang pendidikan SMA/MA/SMK, dilibat dengan besarnya indikator pemerataan dan perluasan pendidikan, yang meliputi: pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang pendidikan SMA/MA/SMK yang masih rendah merupakan indikator masih belum tuntasnya pelaksanaan pendidikan pada jenjang pendidikan SMA/MA/SMK di provinsi Sumatera Barat. Rasio Siswa per Guru (R-S/G) berdasarkan hasil perhitungan diperoleh terlalu banyaknya jumlah guru yang ada di Sumatera Barat pada jenjang pendidikan SMA/MA/SMK. Rasio Siswa per Kelas (R-S/K) berdasarkan hasil perhitungan jumlah siswa per kelas masih di bawah dari standar ideal, sehingga masih memungkinkan penambahan jumlah siswa untuk mengikuti pendidikan SMA/MA/SMK di Sumatera Barat. Sedangkan Rasio Siswa per Sekolah (R-S/S) menunjukkan berlebihnya jumlah sekolah pada jenjang pendidikan SMA/MA/SMK di Sumatera Barat. Oleh karena itu dibutuhkan kebijakan dari Dinas Pendidikan untuk melakukan verifikasi kelayakan sekolah yang ada pada jenjang pendidikan SMA/MA/SMK.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, NS , (2003), *Ekonomi Pendidikan*, Pusat Penerbitan Universitas Terbuka, Jakarta.
- Bappeda, (2007), *RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2006-2010*, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Padang.
- Bappeda, (2008), *RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025*, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Padang.
- Bappenas, (2005), *Laporan Perkembangan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals/MDGs)*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapenas). Jakarta.
- Bappenas, (2008), *Paparan Rapat Koordinasi Penyusunan RPJMN 2010-2014 Perencanaan Pembangunan Berdimensi Kewilayahan (Pulau-pulau Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua)*. Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta.
- BPKP, (2005), *Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (Revisi)*, Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah. BPKP. Jakarta.
- BPS, (2008), *Survei Sosial Ekonomi Nasional 2007 Provinsi Sumatera Barat*, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. Padang.
- BPS, (2008), *Sumatera Barat dalam angka 2008*, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. Padang.
- Bollag, Burton. (2003). *Study Documents Economic Benefits of Secondary and Higher Education in the Developing World*. Unesco Publishing. France.
- Center for the study of living standard. (2001). *Discussion paper on health and education human capital indicator*. Center for the study of living standard. Ottawa.
- Depdiknas, (2005), *Pelatihan Tenaga Perencana Pendidikan*, Biro Perencanaan Sekretariat. Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta.
- Depdiknas, (2006), *Arah pengembangan Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah*, Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta.
- Depdiknas, (2007), *Panduan Pelaksanaan Pengembangan SMK Boarding School Berbasis Komunitas*, Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta.
- Depdiknas, (2008a), *Kebijakan Teknis Direktorat Pembinaan SMP*, Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Jakarta.
- Depdiknas, (2008b), *Panduan Pelaksanaan Program Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun*, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Jakarta.
- Depdiknas, (2009), *Penyusunan Rencana dan Program Pendidikan Tahun 2010*, Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta.
- Dewi, Laksmi. (2005), *Perencanaan Pembangunan, Hand Out Mata kuliah Perencanaan Makro*, Ppn Pasca Sarjana. Universitas Andalas
- Dinas Pendidikan Sumbar, (2007) *Profil Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Tahun pelajaran 2006/2007*, Padang
- Dinas Pendidikan Sumbar, (2008) *Profil Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Tahun pelajaran 2007/2008*, Padang